

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak reformasi, keterlibatan perempuan dalam panggung politik Indonesia mulai berkembang. Keikutsertaan dalam pentas politik dapat mengimbangi eksistensi kaum laki-laki dan acap kali mampu memberikan warna tersendiri pada kiprah politik yang dijalaninya. Pada momentum pemilihan umum (pemilu) keberadaan perempuan sudah mulai memerankan figur baru dalam tatanan politik yang akan selalu berkembang dengan banyaknya kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Keberadaan anggota parlemen perempuan sangat penting untuk mengisi pembangunan, terlebih dalam membela kaumnya, karena dipandang lebih mengerti ihwal kaum ibu. Tatkala menilik persoalan bangsa saat ini, kehadiran legislator perempuan menjadi sangat strategis, ketika permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh anggota legislatif laki-laki. Pada akhirnya nanti, perempuan dapat masuk dalam lingkaran dari proses politik kepemimpinan, baik dalam taraf lokal, regional bahkan nasional.

Kiprah perempuan dalam gelanggang politik merupakan wujud dari partisipasi politik. Inilah menjadi prinsip dasar dari demokrasi, yakni masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan politik. Indonesia adalah negara demokrasi yakni menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Partisipasi politik merupakan salah satu jalan untuk mengimplementasikan negara demokrasi.

Partisipasi politik sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, bisa dilakukan oleh siapa saja, baik masyarakat umum bahkan dari kalangan selebritaspun. Dewasa ini para artis Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Pada zaman Orde Baru, aktris yang menjadi politisi kapasitasnya hanya sebagai penarik khalayak pada masa kampanye dan mesin pendulang suara (*vote getter*). Kemunculan para selebritas menjadi daya raih untuk meraup simpati publik di panggung politik Indonesia. Ciri penting dari

pemilu pasca era Orde Baru yakni ditandai dengan berbagai perubahan. Salah satunya adalah krusialnya peran kader dalam pemilu dan keterlibatan artis dalam pemilu legislatif (Fealy, “*Indonesia’s Legislative Elections: The Importance of Money and Personalities*”, dalam *Australian Institute of International Affairs*, 30 April 2014 diakses 23 November 2017 pukul 12:16 WIB).

Korelasi antara politisi dan artis sudah berlangsung sejak lama. Hubungan ini sama halnya dengan jalinan antara politisi dan jurnalis (media). Oleh sebab itu ada yang beranggapan bahwa selebritas baru muncul sekitar 1950-an setelah televisi digunakan sebagai media hiburan dan kampanye dalam masyarakat Amerika (Cangara, 2011:298).

Politisi membutuhkan artis dalam mengumpulkan masa di lapangan atau tempat terbuka lainnya. Khalayak merasa terhibur dengan kedatangan atau mendengarkan nyanyian secara langsung dari idola mereka. Seorang artis belum tentu selebritas, tetapi biasanya selebritas dari kalangan; penyanyi, atlet, super model, bintang film atau sinetron dan presenter TV.

Selain memiliki kemampuan tertentu di bidangnya, seorang selebritas menjadi daya tarik karena mempunyai *camera face*, tetapi hal itu tidak menjadi suatu jaminan, karena dalam realitanya tidak seindah apa yang terlihat dalam layar kaca. Peran media sangat berpengaruh untuk membangun citra (*image*) melalui liputannya. McNair membandingkan selebritas dengan pahlawan. Seorang pahlawan dikenal karena sepak terjangnya membela kepentingan orang banyak melalui kemampuan dirinya (*self capability*) karena ia adalah *bigman*, tetapi seorang selebritas justru dikenal berkat liputan media, karena itu ia menjadi *bigman* (Cangara, 2011: 298).

Pada pencalonan presiden AS Barack Obama pada tahun 2008, beliau mendatangkan ratu *talk show* Oprah Winfrey sehingga menarik masa sebanyak 18.500 orang. Di Indonesia sendiri, masa kampanye dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan “musim panen” bagi selebritas. Banyak partai menggandeng mereka dengan bayaran yang fantastis (Cangara, 2011: 299).

Riset mengenai selebritas dan politik di Indonesia semakin menarik karena faktanya banyak partai politik (parpol) yang menggaet selebritas sebagai calon

legislatif (caleg) dalam pemilu. Terlihat pada pemilu 2004, dari 48 parpol, ada 13 parpol yang melibatkan selebritas dengan jumlah caleg dari kalangan selebritas 38 orang, tetapi yang lolos ke DPR hanya 7 orang dengan presentase 1,20 persen dari jumlah anggota DPR 550 anggota. Sedangkan pada pemilu 2009, dari 38 parpol peserta pemilu, 11 parpol mengikutsertakan caleg selebritas. Jumlah selebritas 61 orang, namun yang berhasil menuju parlemen 19 orang dengan presentase 3,30 persen dari jumlah anggota dewan sebanyak 560. Terjadi sedikit peningkatan dibanding dengan pemilu sebelumnya. Terakhir pada pemilu 2014, terdapat 10 partai yang melibatkan selebritas dalam pemilu dari 12 parpol peserta. Jumlah caleg selebritas yang terdaftar sebanyak 77, dan yang terpilih 22 orang. Anggota dewan dari kalangan selebritas meningkat persentasenya sampai 3,92 persen dibanding periode pemilu sebelum-sebelumnya dari jumlah seluruh anggota DPR 560 anggota (Darmawan, 2015:237).

Menarik pengakuan seorang anggota DPR, bahwa kehadiran selebritas di DPR tidak didasarkan oleh profesionalisme sebagai politisi, melainkan hanya sebagai bunga-bunga, dan penggembira. Mereka terbiasa datang, duduk, tanda tangan, lalu pergi dan meninggalkan tugas-tugas pembahasan undang-undang yang menjadi tugas anggota dewan. Begitulah dunia politik jika diwarnai pernak-pernik selebritas (Cangara, 2011: 301).

Sejauhmana pro-kontra politikus artis ini, menjelang Pemilu 2014 survei dari *Pol-Tracking Institute* menyatakan bahwa, calon legislatif (caleg) yang berasal dari kalangan selebritas mendapat persentase sebanyak 16,8 persen sedangkan yang mempunyai *background* politisi atau pengurus partai dipilih 50,9 persen responden dari total responden 1.200 orang. Jika dihitung, caleg dengan latar belakang selebritas hanya dipilih 201 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya kepada caleg yang mempunyai latar belakang politisi murni, agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan dengan baik (Faqih, "Caleg Artis Tidak Terlalu Diminati", 26 Januari 2017 dalam Republika.co.id, diakses 24 November 2017 pukul 09:06 WIB).

Calon legislatif (caleg) perempuan yang terpilih di DPR RI kurun waktu 2014-2019 sebanyak 17,32 persen atau setara dengan 97 orang. Pada periode ini,

anggota dewan perempuan mengalami penurunan dibanding masa sebelumnya yaitu sebanyak 103 orang (Aritonang, “Ini 97 Orang Perempuan Anggota DPR Periode 2014-2019”, 14 Mei 2017 dalam Kompas.com, diakses 24 November 2017 pukul 09:52 WIB).

Berbicara tentang keterwakilan perempuan baik dari kalangan politisi atau selebritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menuntun kiprahnya di panggung politik. Perempuan politisi Indonesia merupakan kelompok yang mengalami kesulitan melompati tembok tebal yang menghadang, yaitu tembok budaya dan ideologi patriarki. Penyebab utamanya adalah dunia politik dianggap sebagai dunia kotor milik laki-laki, sehingga membuat kondisi yang tidak nyaman bagi perempuan. Konstruksi sosial yang demikian itu menjadi momok bagi perempuan dan meminggirkan mereka, sehingga dengan sendirinya, politik secara signifikan diisi oleh lebih banyak representasi (keterwakilan), kepentingan, dan cara pandang yang sangat maskulin.

Terdapat suatu stereotip, atau pelabelan negatif yang memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kondisi ini berkembang lebih cepat melembaga sehingga upaya perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, akan berbenturan dengan sistem sosial budaya dan politik yang tidak responsif terhadap tuntutan kesetaraan gender. Pada era reformasi peraturan ketentuan tentang *affirmative action* yaitu tindakan khusus sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) pasal 2 ayat (2) yang memberikan porsi 30 persen untuk politisi perempuan. Akibatnya, potensi perempuan tidak dapat berkembang secara optimal, dan proses diskriminasi, perlakuan tidak adil serta marginalisasi perempuan berlangsung secara terus menerus di berbagai bidang kehidupan termasuk dunia politik dan hukum (Aziz, 2011: 7).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise terus mengupayakan peningkatan jumlah pekerja wanita di berbagai bidang, salah satunya di sektor politik. Keterwakilan perempuan di

legislatif, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 10/2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Hal ini merupakan upaya untuk mensukseskan *United Nation Women* tentang Planet 2030 dengan perbandingan *gender* 50:50 di berbagai sektor pembangunan nasional (Manafe, “Kementrian PPPA Siapkan “*Grand Design*” Keterwakilan Perempuan di Legislatif”, 3 November 2015 dalam BeritaSatu.com, diakses 24 November 2017 pukul 10:13 WIB).

Politisi perempuan dari kalangan selebritas merupakan minoritas diantara profesi perempuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan yang ia miliki. Karena isunya, para artis yang terjun ke dunia politik disebabkan karena popularitas dibanding pengalamannya. Hal ini didukung dengan sistem mutualisme politik, yang mana partai politik (parpol) perlu poin elektoral, sedangkan artis juga butuh aktualisasi dan penambahan finansial untuk tambahan modal ketika pensiun nanti, sebab mereka sadar bahwa usia keartisan itu tidaklah lama.

Motif itulah yang mendorong selebritas untuk menaruh nasib di pemilu dengan biaya yang tinggi. Segala cara dan strategi ditempuh untuk meloloskannya ke parlemen. Partai politik (parpol) tidak peduli apakah mereka paham tentang visi misi partai, konstitusi dan dasar berpolitik. Kegagalan dalam mempresentasikan diri sebagai wakil rakyat, seolah mereka tidak bisa melepas jubah keartisannya yang selalu tampil *glamour*, sensasional dan tebar pesona. Dimana politisi identik dengan wibawa dan pandai ber retorika (Pariangu, “Cambuk untuk DPR Artis”, 30 Agustus 2016 dalam JawaPos.com, diakses 24 November 2017 pukul 11:04 WIB).

Memang tidak sepatasnya, membandingkan kinerja anggota parlemen dari kalangan selebritas dan nonselebritas, karena ada juga artis yang mampu menunjukkan kapasitasnya di DPR. Sebab faktor tersebut, pandangan masyarakat tentang seseorang selebritas perempuan yang memutuskan berprofesi sebagai legislator yang memiliki alasan positif juga masih dianggap negatif. Sehingga akan memberi pengaruh pada pengalaman komunikasi legislator perempuan dari kalangan selebritas. Kendati menjadi politisi perempuan di parlemen bukan hal

yang gampang, tetapi banyak kaum hawa yang terjun ke dunia politik. Pasti ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi mereka untuk bergabung. Hal ini menimbulkan adanya sudut pandang yang berbeda tentang pekerjaan sebagai selebritas atau politisi, yang bisa memengaruhi cara mereka memandang diri mereka, sehingga tindakannya tidak terlepas dari konsep diri yang dimiliki mereka.

Konsep diri sangat berkaitan erat dengan komunikasi. Konsep diri muncul dari pengalaman komunikasi. Sejauh mana pengalaman komunikasi yang dirasakan sebelum menjadi politisi, tidak bisa lepas dari interaksi dengan lingkungannya sampai munculah konsep diri itu sendiri dan memunculkan sikap percaya diri dan menghargai kelompoknya.

Konsep diri merupakan pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Konsep diri bukan hanya sekadar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian Anda tentang diri Anda (Rakhmat, 2012:99).

Sukses tidaknya komunikasi tergantung bagaimana kualitas konsep diri orang tersebut. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif akan terlihat selalu percaya diri, penuh optimis dan selalu bersikap positif di setiap keberhasilan atau kegagalan dan menganggap tantangan sebagai suatu peluang. Seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif, ia memandang dirinya sebagai individu yang lemah, tidak menarik, cenderung pesimis dan tidak melihat peluang di setiap tantangan.

Konsep diri positif menunjukkan karakteristik yaitu, merasa mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, dan merasa mampu memperbaiki diri. Sedangkan konsep diri negatif menunjukkan karakteristik yaitu, peka terhadap kritik, bersikap responsif terhadap pujian, cenderung merasa tidak disukai orang lain, mempunyai sikap hiperkritik, dan mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya (Harapan, 2014: 88).

Konsep diri merupakan kemampuan seseorang untuk menilai dirinya terhadap kemampuan dan bersikap dengan orang lain dalam menjalankan

perannya dalam kehidupan berkeluarga atau masyarakat tanpa merasa lebih atau kurang. Konsep diri terbentuk dari pengalaman interaksi dengan orang lain lewat penaksiran yang direfleksikan dengan melihat apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita.

Penaksiran diri (*reflected appraisal*) menunjuk pada ide bahwa manusia menaksir dirinya sendiri dengan merefleksikan atau bercermin dari bagaimana orang menaksir dirinya (*looking glass self*). Jadi hakikat konsep diri sesungguhnya merupakan membayangkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri sendiri (Syam, 2012: 56).

Banyak selebritas perempuan yang memutuskan melanjutkan menjadi seorang legislator, karena mereka memiliki keinginan untuk melakukan perubahan dan kemampuan untuk berinteraksi memberikan pemahaman kepada lingkungan mengenai profesi yang sedang dijalaninya. Keputusan dan konsep diri dipengaruhi oleh perkembangan faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga, atau kelompok rujukan. Lingkungan keluarga merupakan orang-orang terdekat atau orang yang dianggap penting sepanjang hidup, budaya dan sosialisasi, misal orang tua. Kelompok rujukan di sini merupakan partai politik. Jadi konsep diri tidak berkembang dengan sendirinya tetapi melalui proses interaksi sosial.

Interaksi di antara beberapa pihak tersebut akan berjalan dengan baik jika dua atau beberapa individu memiliki kemampuan mengeluarkan simbol yang dimaknai bersama dan mampu diartikan dengan cepat. Legislator perempuan juga tidak lepas dari simbol yang dimaknai bersama oleh lingkungan sekitarnya. Misal, dari segi penampilan, bahasa, tulisan atau simbol lainnya yang memiliki sifat unik dan dinamis. Saat proses interaksi sosial di lingkungan, simbol yang memiliki sifat unik dan dinamis menjadikan manusia berfikir lebih proaktif, kreatif, kritis serta peka dalam menafsirkan simbol yang muncul. Terdapat hubungan antara bahasa dan komunikasi dalam interaksi simbolik. Simbol yang ditafsirkan secara cepat dan tepat dapat menentukan arah perkembangan konsep diri anggota dewan perempuan tersebut.

Berpijak pada interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan legislator perempuan dari kalangan selebritas, tentu ini menjadikan politisi artis merupakan

tokoh yang penting dan patut untuk diperhitungkan. Berdasarkan interaksi simbolik yang menyatakan bahwa individu dapat mengerti segala hal melalui pembelajaran pengalaman serta sebuah makna dapat dipelajari lewat interaksi diantara mereka, dan makna tersebut terbentuk dari pertukaran simbol-simbol dalam kelompok sosial. Selebritas perempuan yang beralih profesi sebagai legislator tentunya memiliki persepsi dan makna tersendiri akan pribadinya. Makna tersebut pasti berbeda dengan makna ketika sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan.

Fenomena politisi perempuan dari kalangan selebritas ini sangat menarik untuk diteliti, karena para artis ini berasal dari latar belakang lingkungan yang berbeda serta mereka menjadi minoritas di tengah mayoritas politisi laki-laki. Menghadapi perbedaan gender, seorang legislator perempuan diharapkan memiliki kesadaran emosional yang baik sehingga memiliki konsep diri positif. Politisi perempuan yang memiliki konsep diri yang positif tampil percaya diri, tangguh, tenang, sabar dan memiliki keyakinan bahwa ia sebagai kader yang baik yakni mampu menyuarakan aspirasi rakyat dengan baik.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah politisi perempuan dari kalangan selebritas di DPR RI. Pemilihan lokasi di DPR RI dilakukan karena DPR RI merupakan lembaga legislatif dimana pusat aspirasi rakyat seluruh Indonesia ditampung di sana, sehingga menjadi anggota dewan bukanlah hal yang mudah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana konsep diri anggota dewan perempuan DPR RI dari kalangan selebritas?”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis membatasi penelitian. Tujuan membatasi ini, agar penelitian penulis fokus terhadap konsep diri anggota dewan perempuan DPR RI dari kalangan selebritas.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep diri anggota dewan perempuan DPR RI dari kalangan selebritas?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran dan melakukan pengkajian secara mendalam yang terakomodasi dalam bentuk pertanyaan yang dirumuskan pada pertanyaan penelitian di atas tentang konsep diri anggota dewan perempuan dari kalangan selebritas di DPR RI.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep diri anggota dewan perempuan DPR RI dari kalangan selebritas.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah sebagai sumbangsih pemikiran bagi kajian psikologi komunikasi dalam fokus konsep diri dan interaksionisme simbolik. Selain itu juga sebagai tambahan referensi atau bahan bacaan di bidang psikologi komunikasi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam mempersepsikan seseorang selebritas perempuan yang berprofesi sebagai anggota dewan dan masih aktif menjalankan profesinya.